

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Allen dalam Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah* (reformasi perencanaan, strategi, dan peluang, Erlangga, Jakarta, 2004

Amin Rahmanurrasyid, Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, (tesis tahun 2008),

Amin Suprihartini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cet.1, Klaten: Cempaka Putih, 2007.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. II, Jakarta : Rineka Cipta : 1994

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Ed. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa)*, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni 1991

Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Angkasa, 1981.

- Djainuri, Aries dkk, *Sistem Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Pusat Penerbit Universitas Lampung , 2003
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 1996,
- Henry Arianto, *Modul 1 Metode Penelitian: Bentuk Penelitian Normatif dan Bentuk Penelitian Empiris*, Jakarta: Univ. Esa Unggul, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negera Republik Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 1988
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketetanearaan*, Rineka Cipta Cipta, Jakarta, 2000
- Miftah Toha, “Transparansi dan Pertanggung Jawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah,” Makalah disampaikan pada seminar hukum nasional ke-7, Jakarta, 1999
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah reformasi perencanaan, strategi, dan peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004

- Mohammad Mahfud MD, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan yang Bersih*, cet. 2 Yogyakarta: UII Press, 2001
- Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta, 1988
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Ttp : Balai Lektor Mahasiswa, cet.th
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai dasar Dakwaan*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Cet. Ke-1
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995
- Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2002
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011
- Willy, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur. Sinar Grafika, 2013
- Widjaja, H. AW., *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

## 2. On-Line Information Via Internet

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, “Pengertian Alokasi Dana Desa” yang tersedia di <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-Desa-add/> (On-Line), 23 Juni 2017.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Sejarah Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia” tersedia di <http://www.bpkp.go.id/tentang-kami/> (27 Juni 2017).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, “Tugas dan Fungsi”, tersedia di <http://bpkp.go.id/jatim.bpkp/Kedudukan-Tugas-Pokok-dan-Fungsi.bpkp> (On-Line), 28 Juni 2017.

Joko Tri Haryanto, “Manfaat Bijak Dana Desa” (On-Line), tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-Desa> (23 Juni 2017).

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T%2027944-Implementasi%20hak-Methodologi.pdf>

<http://eprints.ung.ac.id/614/3/2013-2-74201-271409043-bab2-09012014033259.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/2209/9/BAB%20II.pdf>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18037/RAHMAT%20ISLAM%20FAKULTAS%20HUKUM.pdf?sequence=1>

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN.No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Desa*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, LN.No. 158 Tahun 2005, TLN.No. 4587.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, LN No. 400 Tahun 2014.

Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Bupati Jember, *Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015*, Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015.